



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak perlu pengaturan Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

11. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
12. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan *otoritas legal* Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan *otoritas legal* serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
15. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
16. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
18. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
20. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
21. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan kedinasian keluar dan ke dalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II atau Eselon III pada Instansi/Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat

Eselon III dan IV seperti Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

23. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur *Auditor* pada Inspektorat Daerah, pengawas *Intern* pada Satuan Pengawas *Intern* pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Pengguna *Eksternal* adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - b. sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan motivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib;
  - d. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, *otentisitas* dan *realibilitas* arsip dapat tetap terjaga; dan
  - e. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.
  - b. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
  - c. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. pengamanan Arsip Dinamis;
- c. kategori klasifikasi keamanan dan akses; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. tingkat klasifikasi arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
  1. informasi biasa/terbuka;
  2. terbatas; dan
  3. rahasia.
- b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- c. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- e. pengguna *eksternal* hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

### Bagian Kesatu Sarana

#### Pasal 5

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. perangkat keras (*hardware*); dan
  - b. perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengaman seperti kamera pengawas (*Closed Circuit Television*), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga serta vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

## Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

### Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsip.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES

### Pasal 7

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

### Pasal 8

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian antara lain berupa personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, atau rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan antara lain berupa berkas pengadaan barang;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan antara lain berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan antara lain berupa berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip antara lain berupa daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

#### Pasal 9

Arsip Dinamis yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau *personal file*;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, atau instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip yang berisi akta otentik yang terakhir atau wasiat;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

#### Pasal 10

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 11

Tabel klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 69 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP  
 DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. UMUM</b>						
	001	Lambang, meliputi: a. Garuda b. Bendera kebangsaan c. Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. Bandir/umbul-umbul	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda
	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non PNS	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda
	003	Hari Raya/besar, meliputi: a. Nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) b. Keagamaan c. Hari ulang tahun	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bag Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda
	004	Ucapan, meliputi: a. Terima kasih b. Selamat c. Mohon diri d. Bela sungkawa, dan lainnya	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bag Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bag Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda
	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bag Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	010	Urusan dalam, meliputi: a. Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainase) b. Rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun c. Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll) d. Pengurusan kendaraan dinas e. Keamanan/ketertiban kantor f. Perjanjian kerjasama MoU Pemda dengan instansi pemerintah, swasta g. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kenegaraan dan hari-hari besar keagamaan h. Kebersihan kantor i. Protokol (upacara bendera, tata tempat, pemasangan kepala negara/daerah, audensi, penerimaan tamu) j. Kerja sama	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum dan Bagian Humas
	020	Barang dan Jasa, meliputi: a. Penawaran (barang, jasa)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak) c. Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang d. SPK, kontrak/amandemen/ <i>addendum</i> , teguran e. Surat Perintah Mulai Kerja f. Serah terima pekerjaan g. Pemeriksaan pekerjaan h. Perpanjangan waktu i. Denda j. Sanggahan k. Pemeliharaan barang/jasa l. Inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum dan Bagian Humas 3. Bagian Administrasi Pembangunan
	020	ULP Barang dan Jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Eksternal dan Penegak Hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Humas
	020	Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum dan Bagian Humas; 3. Bagian Administrasi Pembangunan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	030	Kekayaan Daerah, meliputi: a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak) b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll) c. Barang persediaan dalam gudang d. Alat pengangkut (laut, darat, udara) e. Peralatan pabrik, Laboratorium f. Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan) g. Usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya i. Penghapusan aset-aset barang milik Daerah j. Usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta pelaporannya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum dan Bagian Humas 3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
	030	k. Peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/barang inventaris, aset bergerak	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>maupun tidak bergerak</p> <p>1. Tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban aset-aset barang milik Daerah</p>		<p>Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum</p>	<p>diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>masing Perangkat Daerah</p> <p>2. Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas</p> <p>3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah</p>
	040	<p>Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan)</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum</p>	<p>Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.</p>	<p>Sekretariat, Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>
	040	<p>Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan Pustaka</p> <p>Pelestarian bahan Pustaka</p> <p>Pengolahan hasil serah simpan karya cetak</p>	<p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,</p>	<p>Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki</p>	<p>Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan</p>

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>dan karya rekam</p> <p>Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder</p> <p>Transliterasi, translasi</p> <p>Survey kondisi bahan Pustaka</p> <p>Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan Pustaka, dan alih media bahan Pustaka</p>		Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Perpustakaan
	040	<p>Pengembangan bahan Pustaka</p> <p>Pembinaan perpustakaan</p> <p>Pengembangan dan kerja sama perpustakaan</p> <p>Pembudayaan gemar membaca</p> <p>Penerapan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan</p> <p>Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepastakawanan,</p> <p>Penilaian Angka Kredit Pustakawan</p> <p>Pemasyarakatan bidang perpustakaan</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Seksi Promosi dan Pengembangan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	040	<p>Pembinaan dan pengembangan Kearsipan</p> <p>Bimbingan Teknis Kearsipan</p> <p>Pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol dan masyarakat</p> <p>Penyusunan norma standar prosedur dan</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Seksi Pembinaan, dan Layanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		kriteria arsip Pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan, evaluasi dan penilaian hasil pengawasan kearsipan		Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	
	040	Akuisisi arsip Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip Penerimaan, pemindahan, dan penyerahan arsip Penelusuran dan wawancara secara lisan Penyelamatan arsip vital daerah Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip Penyusunan indeks, guide, daftar, dan inventaris arsip Transkripsi rekaman suara Penyusunan arsip citra daerah Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		alih media dan reproduksi arsip statis Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Restorasi dan registrasi arsip Autentikasi arsip statis				
	040	Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip; Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan, Pameran, publikasi dan masyarakat kearsipan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Seksi Pembinaan dan Layanan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	040	Laporan kegiatan operasional perawatan arsip beserta pengamanannya aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Bagian Umum

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	040	SANDI a. Pengamanan Persandian dan Informasi b. Tata kelola persandian c. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian e. Pengelolaan <i>security operation center</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Organisasi
	050	RPJPN ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bappeda Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pembangunan) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kementerian Lembaga) RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)				
	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Non Pemerintah Organisasi Internasional	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Organisasi semi pemerintah Lembaga Non Struktural Kelas Jabatan Analisis Jabatan Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan, Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Kompetensi Manajerial				
	060	Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas, Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/non pemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut, Pola Hubungan Kerja, Standar Rumah Tangga Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai  Indeks Kepuasan Masyarakat  Standard Pelayanan  Inovasi Pelayanan  Standard Prasarana Kerja Pegawai	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah  2. Bagian Organisasi
	060	Akuntabilitas Kinerja	Biasa/	Penentu	Informasi arsip	1. Sekretariat/Bagian

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Zona Integritas Reformasi Birokasi Budaya Kerja	Terbuka	Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Umum pada masing- masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi
	070	Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset desain, pembahasan sampai laporan riset	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
	070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota, Desa	Bisnis/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Inkubator Teknologi dan Bisnis		Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Pameran Produk Inovasi/Ristek Bisnis Teknologi Center (BTC) Penerapan Iptek (Raptex) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kajian Kajian Strategis/diskusi/FGD Seminar, Workshop	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Kerja sama Penelitian Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Perguruan Tinggi/Swasta Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga International, Perakayasaan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan); Publikasi Ilmiah, Jurnal Ilmiah				
	080	Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri)  Himpunan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda  Studi banding, kunjungan kerja	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah  2. Bagian Umum dan Bagian Humas
	080	Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah  2. Bagian Umum dan Bagian Humas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					pemerintah.	
	090	Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi: a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementrian, Tamu asing (ke daerah, Eselon I) b. Gubernur, Wakil Gubernur c. Laporan perjalanan pegawai, SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah d. Laporan hasil kegiatan peliputan Kunker RI, Wakil Gubernur, Menteri, dan pejabat pusat ke Daerah e. Laporan hasil peliputan kegiatan Kunker Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda ke Kabupaten/Kota.	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda
	090	Laporan Perencanaan kegiatan Kunker Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Pusat ke Daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Bagian Humas Setda

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					atau ketertiban umum	
	090	Laporan perencanaan kegiatan Kunker Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda ke Kabupaten/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Bagian Umum
	090	Laporan perencanaan kegiatan kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Bagian Umum
<b>II. KEPEGAWAIAN</b>						

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi: a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
		c. Statistik	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Informasi Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	810	Pengadaan Pegawai, meliputi: a. Pendaftaran CPNS ( <i>Testing, Screening</i> , Pengumuman tes dan pemanggilan,	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	1. Sekretariat/Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pengujian kesehatan, Pengangkatan CPNS golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/MITRA KERJA		Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	2. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	820	Mutasi, meliputi: a. Pengangkatan CPNS b. Pengangkatan PNS golongan I-III	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	820	c. Pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural eselon I-IV	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	
	820	d. Pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	820	e. Kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Informasi Data Kepegawaian pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum		
	820	f. Kenaikan pangkat golongan I-IV g. Pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. Lolos butuh i. Data sering dan penempatan kembali j. Wajib militer	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	830	Kedudukan, meliputi: a. Peninjauan masa kerja	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum		
		b. Penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
		c. Penghargaan ijazah (pencantuman gelar)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum		
	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi: a. Tunjangan (struktural/fungsional) b. Kehormatan c. Tambahan penghasilan d. Taspen, Askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. Surat dispensasi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	850	Cuti, meliputi: a. Tahunan b. Besar c. Sakit d. Bersalin e. Alasan penting f. Di luar tanggungan negara	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	860	Penilaian, meliputi: a. Penghargaan (satyalencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	860	b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat, Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	860	c. Konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	d. Ujian dinas tingkat I dan III	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	860	e. Penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	f. Rehabilitasi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. Formasi pegawai	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	b. <i>Bezetting</i> /daftar urut kepegawaian c. DUK Non PNS tidak tetap/ BLUD	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPEG, tanda pengenal, daftar keluarga, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana	Informasi arsip yang apabila diketahui publik	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah.	Pelatihan (BKPP)
	870	f. KORPRI	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
	880	Pemberhentian, meliputi: a. Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang menggangu	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	masing Perangkat Daerah
	880	b. Pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
	880	c. Karena meninggal	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum		
	880	d. Alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	880	e. Tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	880	f. Pembekalan PNS yang akan purna dan tali asih	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	880	g. Permemberhentian pegawai Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha ): a. Perencanaan program pelatihan b. Sarana Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	1. Sekretariat pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Jenis diklat dan Pelaporan diklat d. Pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (izin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali) f. Tenaga pengajar/narasumber g. Jurnal Ilmiah h. Penelitian i. Magang j. <i>Short course/in house training</i> k. Evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber		Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	masing Perangkat Daerah
	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu: a. Sertifikasi Kompetensi b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengajar c. Pengendalian Mutu Diklat d. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Karya Tulis/ Lokakarya f. Kurikulum, Silabi dan Modul g. Metode Pembelajaran (kuliah, ceramah, simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)		Penegak Hukum		
	890	Pengembangan Kompetensi Teknis: a. Pengembangan Kompetensi/Diklat Teknis Umum b. Pengembangan Kompetensi/Teknis Inti c. Pengembangan Kompetensi/Teknis Pilihan d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional: a. Pengembangan Kompetensi/Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b. Pengembangan Kompetensi/Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional c. Pengembangan Kompetensi/Diklat Teknis Jabatan Fungsional	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan				
	890	Pengembangan Kompetensi Manajerial: a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah c. Pendidikan Dasar bagi CPNS d. <i>Visitasi/Benchmarking</i> e. Inovasi Kepemimpinan.	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
<b>III. KEUANGAN</b>						
	900	Keuangan meliputi: a. Nota Keuangan b. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	910	Anggaran, meliputi: a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD b. DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD c. Anggaran kas d. Surat Penyediaan dana (SPD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bidang Akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh	Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas pada

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 2. Sekretariat/ Bagian Umum/pada masing-masing Perangkat Daerah
	950	Pengelolaan kas daerah meliputi: a. Laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji b. Laporan rekapitulasi penerimaan daerah, daftar pemotongan dan penyetoran pajak (ppn/pph) dari CV/PT/instansi, surat tanda setoran (STS), laporan realisasi daerah meliputi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum di masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		penerimaan dan pengeluaran c. Rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank			lembaga pemerintah.	
	950	a. Laporan mutasi penempatan deposito b. Surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Bidang Perbendaharaan pada Badan Kepegawaian Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggungjawaban APBD Kab/Kota, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Bidang Program pada Badan Keuangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					pemerintah.	
	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat/Bidang pada Badan Keuangan Daerah (BKD) 2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Reklame	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah.	1.Badan Keuangan Daerah (BKD) 2.Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
	970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	1.Badan Keuangan Daerah (BKD)

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar)</p> <p>Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)</p> <p>Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)</p> <p>Retribusi penggunaan air bawah tanah</p>		<p>Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum</p>	<p>diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>2. Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah</p>
	970	<p>Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)</p> <p>Retribusi bidang perikanan dan kelautan</p> <p>Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi</p> <p>Cukai</p> <p>Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)</p>	<p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum</p>	<p>Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>1.Badan Keuangan Daerah (BKD)</p> <p>2.Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah</p>
	970	<p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air</p> <p>Pajak</p>	<p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas</p>	<p>Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang</p>	<p>1.Badan Keuangan Daerah (BKD)</p> <p>2.Sekretariat/Bagian Umum pada</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Retribusi Bunga Deposito Bunga Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) Sumbangan Pihak Ketiga (Kendaraan Dealer, Kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana Bergulir/ <i>Revolving</i> Kerja sama dengan BUMIDA Penerimaan DUKS		Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	menggangu kinerja Perangkat Daerah.	masing-masing Perangkat Daerah
	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	1.Badan Keuangan Daerah (BKD) 2.Sekretariat/Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		pendapatan			pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	

**B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I. PEMERINTAHAN</b>						
	120	PEMERINTAH KABUPATEN Monografi, Tambahkan Kode Wilayah	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana	Informasi arsip yang apabila diketahui publik	Bagian Umum dan Bagian Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	
	120	<p>Kebijakan Pemerintah Kabupaten Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasama Antar Kabupaten/Daerah, dan Luar Negeri Kabupaten, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya Sekretaris Daerah, meliputi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida				
	120	Penyerahan Urusan/SPM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	120	Pemindahan Ibukota Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan Penyerahan Urusan				
	120	Pembentukan /Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bagian Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				dan Penegak Hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	120	Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan
	120	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	120	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan
	120	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan
	120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	Bagian Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan
	130	Wilayah Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	Bagian Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	
	140	PEMERINTAH DESA APBDesa/Kelurahan, Permasalahan Batas Desa/Kelurahan Penghapusan Desa/Kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa
	170	DPRD KABUPATEN/KOTA a. Pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Sekretariat DPRD

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Eksternal dan Penegak Hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	170	<p>b. Pemberhentian antar waktu, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan</p> <p>c. Alat kelengkapan dewan (pimpinan badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain/pansus)</p> <p>d. Persidangan (rapat-rapat: paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, PANSUS, komisi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, pandangan umum, fraksi)</p> <p>e. Fraksi (tata tertib, kode etik)</p> <p>f. Reses, peninjauan/kunjungan lapangan, kunjungan kerja/studi banding/konsultasi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat DPRD

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		g. Kesejahteraan, keuangan, dan penghargaan h. Hak				
	180	HUKUM Kontitusi Dasar Negara Undang-Undang Dasar Undang-Undang Peraturan pemerintahan Peraturan Presiden/Instruksi Presiden, Peraturan Menteri/Instruksi Menteri Tap MPR, Konvensi, Perdata, Pidana	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Kewenangan Pusat
	180	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Bagian Hukum

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum		
	180	Perundangan Tingkat Desa meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Penentu Kebijakan, Pengawas dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Bagian Hukum
	180	Perundangan tingkat Kabupaten meliputi Keputusan Bupati Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota Meliputi Keputusan Bupati/Keputusan Walikota Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama Peradilan Tinggi,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Bagian Hukum

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Mahkamah Agung				
	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Bagian Hukum
	180	Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Islam Agung Mahkamah Militer Tingkat Pertama Mahkamah Militer Tinggi Mahkamah Militer Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Tata Usaha Negara Peradilan Tingkat Pidana Korupsi Peradilan Hak Asasi Manusia Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Ombustmen				
	180	Upaya Hukum Banding Kasasi <i>Derden Verset</i> Peninjauan Kembali Grasi, Amnesti, Abolisi Eksekusi Pembinaan Hukum, meliputi Kadarkum Bantuan Hukum, meliputi LBH Hukum Internasional Imigrasi Visa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Paspor <i>Exit</i> <i>Reentry</i> Lintas Batas/Batas Antar Negara Kepenjaraan Registrasi Narapidana Pembinaan Narapidana Pembebasan Narapidana				
	180	Tahanan Titipan Kejaksaan Penuntutan Umum Penuntutan Khusus Hukum Adat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kewenangan Pusat
<b>II. POLITIK</b>						
	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	1. Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan IPOLEKSOSBUDHANKAM Orde Baru Orde Reformasi		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Pemerintahan
	210	Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/organisasi terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai /organisasi terlarang Izin Meninggalkan tempat/domisili bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		anggota partai/organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang				
	220	Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	220	Munas/Musda Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum		
	220	Verifikasi dan rekomendasi hibah ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	240	ORGANISASI PEMUDA	Terbatas	Dibatasi	Informasi arsip	Sekretariat, Badan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi		hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kesatuan Bangsa dan Politik
	250	ORGANISASI BURUH, TANI Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi, Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	260	ORGANISASI WANITA	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan Organisasi		untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Politik
	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) Pencalonan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS, Kendaraan, Surat Suara, Kotak Suara) Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang pilkada		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Pemerintahan
	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				dan Penegak Hukum	dan fungsi lembaga pemerintah.	
	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Bagian Pemerintahan
	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Penegak Hukum	pemerintah.	
<b>III. KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Koordinasi dan kerja sama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)				
	300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawasan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan, dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja
	310	PERTAHANAN Darat, Laut, Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kewenangan Pusat

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-Hara/Demonstrasi Senjata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja
	330	Bahan Laporan: - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/ Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	330	Hasil Pelaksanaan Monitoring	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Penanganan Ideologi/Paham Lain - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang Keadaan Anggota Organisasi Terlarang - Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi Terlarang		untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Politik
	330	Bendel Rahasia Intelijen meliputi: Dokumen Paham Lain - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelejen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pembinaan dan Diklat Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja
	350	KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Kesbanglimas, Satuan Polisi Pamong Praja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Subversi/Penyeludupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan		Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kesbanglimas, Satuan Polisi Pamong Praja
		Kejahatan lainnya ( <i>trafficking</i> , hipnotis, dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Sekretariat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				dan Penegak Hukum	dan fungsi lembaga pemerintah.	
	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan, Berita Acara, MoU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD
	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparatur PBP	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Latihan ketrampilan pemadam kebakaran		Hukum		
	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD
	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan bencana Penanggulangan bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi, PUSDALOPS, kunjungan lapangan, relawan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Laporan bencana				
	390	Kerja Sama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Sukoharjo dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, BPBD
	390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD
	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana	Informasi arsip yang apabila diketahui publik	Sekretariat, BPBD

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Rapat Koordinasi PBD		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	
	390	Kegiatan dari Instansi Luar BPBD Terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan  Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat, BPBD
<b>IV. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
	400	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	Desa 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong Royong Swadaya Gotong Royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan Kerja Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	410	Petunjuk/Pembinaan/Pekembangan	Terbatas	Dibatasi	Informasi arsip	1. Sekretariat, Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Perlombaan Desa dan Kelurahan, Koordinasi, Kerja sama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya		hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb		Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar di antaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, pelajar teladan, pertukaran pelajar)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Uang Sekolah, di antaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Sarana Pendidikan (buku; perlengkapan pendidikan)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Bangunan Pendidikan (Laboratorium; Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan		Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru/Dosen Teladan, Guru/Dosen Berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri Sertifikasi Guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	dan Olah Raga 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, <i>Sea Games</i> , Kejurnas, Olimpiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll) Olah Raga Rekreasi/Massal (Senam, Sepeda Santai, Olah Raga Tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi Sarana Kegiatan Remaja:	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Gelanggang Remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan		Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan Pembinaan Bidang Kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis, dan lain lain)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan Adat/Tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan: Festival, Pentas Seni	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kepurbakalan Museum, Peninggalan Kuno, Candi, termasuk Pemugaran Benda Sejarah Bahasa		Hukum		
	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Hukum		
	440	Jiwa Perawatan Obat-Obatan (penyimpanan dan pengawasannya) Pengadaan Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) IGD; ICU IBS <i>Medical Check Up (MCU)</i> Farmasi Laboratorium Klinik, Patologi, Anatomi, Forensik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/ <i>Laundry</i> Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perizinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
	440	Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan
	440	Gigi, Mata	Biasa/	Penentu	Informasi arsip	1. Sekretariat, Rumah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan Ibu dan Anak JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMPERSAL, Jaminan lainnya Pemeriksaan obat, Distribusi obat, Obat Generik, T.B.C, Kusta, Frambusia Kholera, SARS, dan jenis penyakit lainnya, Pemberantasan Penyakit, Menular Sumber Binatang (P2B), Malaria, <i>Dengue Haemorrhagie Fever</i> (DHF), DBD, Filaria, Serangga	Terbuka	Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A.Pektoris IMA ( <i>Infark Miokard Akut</i> )	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Hipertensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, <i>Mammae</i> , Hepar, Paru dan lainnya				
	440	Epidemiologi dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilans Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Makanan Minuman Sarana Air Minum Pestisida, Insektisida Pencemaran Jamban keluarga, sanitasi rumah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid Higiene sanitasi CA. <i>Mammae</i> Higiene sanitasi CA. Hepar Higiene sanitasi CA. Paru Kejadian Khusus Dekompensasi kordosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Keperawatan Komite Medik Rawat Inap Rawat Jalan RSU, RSJ, RS Khusus Studi Banding Rumah Sakit Penunjang Medis Radiologi				
	440	Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Promosi Layanan Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Medis Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk Pendidikan Spesialis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peralatan Kesehatan Perizinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupuntur				
	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO, <i>Problem Solving for Better Hospital</i> (PSBH), Jamu dan herbal, Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS, Keliling, Poliklinik dan Balai Kesehatan, Rumah Bersalin Posyandu, Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan, Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, Menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
	440	RSU, RSJ, RS Khusus	Terbatas	Dibatasi	Informasi arsip	1. Sekretariat,

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung		hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
	440	Perizinan untuk tenaga medis meliputi surat izin praktek dan surat izin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
	450	AGAMA Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan				Kewenangan Pusat

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		bidang keagamaan				
	450	Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zakat, Puasa, Haji/Umroh) Infaq, Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, dan lain lain) Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah, dan lain-lain	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat Daerah, 2. Dinas Sosial
	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang	1. Sekretariat Daerah, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>Mazhab Agama Islam</p> <p>Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat, dan lain lain)</p> <p>Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)</p> <p>Kristen Protestan, Katholik</p> <p>(Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll</p> <p>Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine, dan lain-lain)</p> <p>Mazhab, Organisasi Gerejani)</p> <p>Hindu, Budha dan Kong Hu Cu</p> <p>Peribadatan</p> <p>Rumah Ibadah (Pura, Candi, Vihara, Klenteng)</p> <p>Tokoh Agama, Rohaniawan</p> <p>Mazhab, Organisasi Agama</p>		Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	3. Dinas Sosial
	460	<p>SOSIAL</p> <p>Rehabilitasi Penyandang Cacat</p> <p>Cacat Ganda</p> <p>Cacat Fisik</p> <p>Cacat Mental/Eks Psikotik</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu	<p>1. Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>2. Sekretariat, Dinas</p>

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar (PGOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia		Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial
	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	1. Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah  2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial
	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	1. Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial
	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Sosial
	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial: Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Sekretariat, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Sosial 4. Dinas

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha		Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	Perindustrian dan Tenaga Kerja
	460	Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	460	Masyarakat Miskin: Raskin, BLT, dan lain-lain Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum	pemerintah.	4. Dinas Sosial 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan: penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb. Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat Suku terasing meliputi Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretariat, Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Krematorium				
	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya ( <i>Trafficking</i> , Hipnotis, dan lain-lain) Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  2. Dinas Sosial
	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	1. Sekretariat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				dan Penegak Hukum	dan fungsi lembaga pemerintah.	2. Dinas Sosial
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Sekretariat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	470	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerja sama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/ sosial dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah</p> <p>Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi</p> <p>Tata ruang pemukiman transmigrasi</p> <p>Rancangan dan pemanfaatan areal tanah</p>				
	470	<p>Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan</p> <p>Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan</p> <p>Pengerahan</p> <p>Pendaftaran dan seleksi calon transmigran</p> <p>Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran</p> <p>Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<p>1. Sekretariat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>2. Dinas Sosial</p>
	470	<p>Rancangan kapling TSM</p> <p>Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang	<p>1. Sekretariat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>2. Dinas Sosial</p>

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah, inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perizinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan		Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	
	470	Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Sekretariat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pengendalian

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penempatan Transmigran Kesiapan lokasi dandaya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calon peserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran		Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan, Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KB Penanggulangan penyakit dan kejadian				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>luar biasa</p> <p>Pendistribusian bantuan pangan</p> <p>Pembinaan rohani</p>				
	470	<p>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</p> <p>Bimbingan adaptasi masyarakat</p> <p>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</p> <p>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</p> <p>Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan, Penilaian transmigran teladan, Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<p>1. Sekretariat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>2. Dinas Sosial</p>
	470	<p>KELUARGA BERENCANA</p> <p>Alat Kontrasepsi</p> <p>Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri</p> <p>Penyuluh Lapangan KB (PLKB)</p> <p>Pos KB desa, Akseptor KB</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<p>1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan</p>

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
						Sipil
	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika
	480	MEDIA MASSA Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal <i>Press Release</i> , Klarifikasi Berita, <i>Press Statistik</i> Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok Perekonomian dan Perbankan Bidang lainnya Layanan Informasi/ <i>Leaflet</i> Masukan Analisis Bupati Televisi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus Kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus Wartawan Temu Pers/Konferensi Pers. Pers <i>Tour</i> Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga Pemerintah Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan <i>Training Photography, Training</i> Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom				
	480	Media Cetak meliputi perijinan hingga	Biasa/	Penentu	Informasi arsip	Sekretariat dan Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran</p> <p>Radio</p> <p>Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau Isi Siaran</p> <p>Pengkajian Isi Siaran</p> <p>SDM Penyiaran</p> <p>Periklanan</p> <p>Ketentuan Pemasangan Reklame</p> <p>Pameran</p>	Terbuka	Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Komunikasi dan Informatika
	480	<p>Pendirian <i>Information Center</i></p> <p>Pembinaan Bidang Infokom</p> <p>Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah</p> <p>Wahana Komunikasi Masyarakat</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)</p> <p>Promosi Luar Negeri</p> <p>Kunjungan Wartawan Asing</p> <p>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi</p> <p>Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan</p>	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bupati Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan <i>Keynote Speaker</i> , Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi/ <i>Pointers</i> Sambutan, Paparan, Naskah <i>Keynote Speaker</i> , Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembangunan Bantuan Kepada/dari Organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik Khusus Wartawan Temu Pers/Konferensi Pers Penyuluhan Masyarakat Publikasi <i>Training Photography</i> <i>Training</i> Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan				
	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	480	Pengelolaan <i>website</i> Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Hukum		
<b>V. PEREKONOMIAN</b>						
	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	500	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum	pemerintah.	
	510	PERDAGANGAN	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Promosi perdagangan Pekan raya, Pameran, Pelelangan, Distribusi, Pemasaran Sembako Penentuan harga pokok, Bina usaha dan sarana perdagangan, Rencana dan program kerja, Beras, Garam Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll, Pemasaran, Pertokoan, Kaki Lima, Kios,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pusat Perbelanjaan				
	510	Pasar Ekspor Ijin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	510	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Ijin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar Pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera dan Tera Ulang, Biaya tera, Cap Tanda Tera Takaran, Timbangan dan anak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		timbangan				
	510	Kalibrasi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Perdagangan antar pulau Aneka Usaha Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Impor	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Ijin Impor Pemberian ijin Pengendalian ijin Standar Mata Dagang Impor Manajemen Perdagangan Internasional Kegiatan Impor Pembinaan Impor Pengendalian Impor Pemantauan Impor Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Impor Penyaluran Kegiatan Impor Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero) Perusahaan Daerah		untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	510	Standar Mata Dagang Impor Management Perdagangan Internasional Kegiatan Impor	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan Impor Pengendalian Impor Pemantauan Impor Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Impor Penyaluran Kegiatan Impor Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero) Perusahaan Daerah		Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	510	Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Promosi dan Informasi Kerjasama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan		Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	
	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum	pemerintah.	
	510	Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	510	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi, Pemberian Badan Hukum Koperasi, Penyelesaian Pembubaran Koperasi, Keragaman Koperasi, Pengakuan Koperasi Sekolah Amalgamasi, Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian, Penyelisihan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintah.	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	510	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu	1. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah		Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas Termasuk Kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	520	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis		dan Penegak Hukum	dan fungsi lembaga pemerintah.	
	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum		
	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanian dan Perikanan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	520	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan
	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Penyuluh Pengembangan SDM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Usaha Perikanan Penangkapan Ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan		Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Perikanan
	520	Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ijin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Biasa / Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan
	520	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi Lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Antar Nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan rencana sonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil Pemberian Rekomendasi, Ijin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi		Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	520	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan
	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha perikanan Sarana Perikanan	Biasa / Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal,	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Rekomendasi ijin Usaha Perikanan (Pembenihan/ Pembesaran) Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP, Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya		Publik serta Penegak Hukum	Daerah.	
	520	Kepelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bimbingan Teknis Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran TPI/PPI Kesyahbandaran Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb	Biasa / Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan
	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam Terumbu karang Mangrove Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan	Biasa / Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/Pendidikan Masyarakat Pesisir		Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	kinerja Perangkat Daerah.	
	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Pternakan Budidaya Usaha Pternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum		
	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Higieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Perkebunan Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan / Benih Produksi Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman Hama Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Alat dan Mesin Perkebunan <i>Power Sprayer</i> <i>Hand Sprayer</i> <i>Polybag</i> Alat Laboratorium Perkebunan Reagen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi; Informasi		Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	520	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Penegak Hukum	pemerintah.	
	520	Distribusi Pangan & Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek & Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Segar Bimtek & Supervisi Pengawasan Keamanan		Eksternal dan Penegak Hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	520	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek & Supervisi Pangan Lokal Analisis & Kajian Potensi Pangan Lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan
	520	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/ Terbuka	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Daerah.		
	530	PERINDUSTRIAN Undang-Undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan/Minuman	Biasa/ Terbuka	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	530	Aneka Industri/Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, pada Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Pangan 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	540	Pengolahan Penyaluran Tangki Pompa Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Pangan 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Energi baru terbarukan Perijinan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				
	540	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah Cekungan Air, Tanah (CAT): Pemetaan, Imbuhan, Lepas, Konservasi, Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Pangan 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsoran, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi				
	540	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah	

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Ijin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan				
	550	PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah	
	550	Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Penegak Hukum	pemerintah.	
	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan
	550	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perkapalan Alat Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu Rambu Trayek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	550	Perkereta-apian Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie Prasarana (Jalan/Jembatan) Angkutan Penumpang (perkereta-apian) Angkutan Barang (perkereta-apian) Keselamatan (perkereta-apian) Kecelakaan (perkereta-apian) Perawatan/Perbaikan Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan
	550	Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/Non Reguler Penerbangan Khusus/Jembatan Udara Pelabuhan/Bandar Udara Tanah/Lokasi Bandara Landasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Perlengkapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara				
	550	POS Pembinaan Kebutuhan fasilitas Rehabilitasi/Perawatan Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban Standarisasi Perangkat Tanah/Bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan Evaluasi Pelayanan, Jasa Pos/Titipan/Giro				Kewenangan Pusat
	550	Benda Pos/Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Elektronik				Kewenangan Pusat

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Perijinan Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan Pembukaan Agen/Cabang Gangguan Saran dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyelundupan				
	550	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Eksternal dan Penegak Hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana		Hukum		
	550	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel Tarif Travel Service	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pramu Wisata Biro Perjalanan/Angkutan Wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/Bangunan				
	550	Bina Usaha Insitusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	550	Meteorologi dan Hidrologi	Biasa/	Penentu	Informasi arsip	1. Dinas Pekerjaan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Data Debit Andalan Curah Hujan Klimatologi Hujan Buatan Peneropongan Bintang	Terbuka	Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Umum dan Penataan Ruang 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi Passport	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Sosial

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW				
	560	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa/ Terbuka	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Publik serta Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui publik tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Sosial
	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)		Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal		Hukum	kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	
	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan ( <i>joint venture</i> /penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Polis Premi, Tertanggung/Pemegang Polis, Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Hukum	pemerintah.	
	580	Investasi Tabungan Deposito Tabanas Taska Tapelpram Bank Pembangunan Daerah Bank Jateng Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank Jateng
<b>VI. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>						
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	590	AGRARIA Tata Guna Tanah Pengurusan Hak-hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan				Kewenangan Pusat
	590	Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan Data, Peta dan Publikasi Fakta Tata Guna Tanah Tanah Kritis <i>Landreform</i> Redistribusi Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek <i>Landreform</i> Pembagian Tanah <i>Landreform</i> Ganti Rugi Ganti Rugi Tanah Kelebihan Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan				Kewenangan Pusat

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Ganti Rugi Tanah <i>Absentee</i>				
	590	Sengketa Ganti Rugi Tanah <i>Absentee</i> Ganti Rugi Tanah Partikelir Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir Bagi hasil Penetapan Imbangan Gadai Tanah				Kewenangan Pusat
		Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Pengurusan Hak-hak Tanah Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis Sewa Tanah Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu :				Kewenangan Pusat

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus Hak Milik Perorangan Badan Hukum Hak Pakai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) Warga Negara Asing Badan Hukum Guna Usaha Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar Pternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan				
	590	Fotogrametri Terristis Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1990) Sertifikat Penjabat Pembuatan Akte Tanah				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Transmigrasi Tata Guna Tanah <i>Landreform</i> Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah				
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang ke PUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Besi Profil (konstruksi) Paku		Penegak Hukum	pemerintah.	
	600	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) Semen Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	600	Kayu Bahan penutup Atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalansi Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/explosive				
	610	PENGAIRAN Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas Internal/ eksternal dan penegak hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	610	Bendungan	Terbats	Dibatasi	Informasi arsip	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa		hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	610	Kantung lumpur Silf ekstretor Escape chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	610	Suplesi Tersier Saluran kwarter	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Saluran pasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi		Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	dan Kawasan Permukiman
	610	Bangunan dan sadap, Bangunan sadap, Bangunan <i>check</i> , Bangunan terjun Bax Tersier, Got miring, Talang, Syphon, Gorong-gorong, Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan, Saluran, Saluran Pembuangan induk, Saluran Pembuangan sekunder, Saluran Pembuangan tersier, Bangunan Bangunan out let, Bangunan terjun Bangunan penahan banjir, Gorong- gorong pembuangan, Talang buang Syphon pembuangan, Bangunan lainnya Jalan, Jalan Inspeksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jembatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Waduk Lapangan Bangunan penunjang jaringan telepon		Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	610	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Banunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gotong Royong Syphon Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan Pintu air pembuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Gorong-gorong pembuangan Shyphon pembuangan Bangunan pengukur air Bangunan pengukur curah hujan Bangunan gudang stasiun pompa Bangunan listrik stasiun pompa Rumah petugas eksploitasi Pasang surut Saluran pembawa tersier Saluran penyimpanan air Saluran pintu pembuangan Bangunan lainnya				
	610	Kolom pasang Saluran Saluran lalu lintas Saluran muka Bangunan Bangunan penangkis kotoran Bangunan pengukur muka air Pengendalian sungai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu pengatur banjir Klep pengatur banjir Tembok pengaman talut Krib Kantung Lumpur <i>Check Dam</i> <i>Syhphon</i> Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainase <i>Coupure</i> Bangunan lainnya <i>Warning System</i> Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur curah hujan Stasiun pengukur air Stasiun pengukur cuaca Stasiun pos penjagaan Pengaman pantai Tanggul			pemerintah.	

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Krib bangunan lainnya Air permukaan (Danau, Waduk, Sungai)				
	620	JALAN Jalan Provinsi Daerah Penguasaan Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Bagian Pembangunan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	620	Bangunan, Bangunan sementara Jalan Sementara, Kantor proyek, Gedung proyek, Barak Kerja, Laboratorium Lapangan Rumah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Bagian Pembangunan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	620	Badan Jalan Pekerjaan Tanah ( <i>earth work</i> )	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat, Bagian Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Stabilisasi, Perkerasan, Lapisan Pondasi bawah, Lapisan Pondasi, Lapisan Permukaan , Drainase , Parit Tanah Gorong-gorong ( <i>culvert</i> ), Buku Trotoir Tanah, Perkerasan, Pasangan, Median, Tanah, Tanaman, Perkerasan, Pasangan, Daerah sampingan, Tanaman Pagar, Bangunan Pelengkap dan Pengaman, Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas, Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM , patok-patok R.O.W. (Sempadan), Rel Pengamanan, Pagar Turap Penahan, Bronjong		untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	620	Jalan provinsi Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah ( <i>earth work</i> ) Stabilisasi Perkerasan ( <i>pavement</i> ) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainase Parit Gorong-gorong ( <i>culvert</i> ) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Sekretariat, Bagian Pembangunan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM				
	620	Patok-patok R,O,W (Sempadan) Rel Pengaman Pagar Turap Penahan Bronjong Daerah Penguasaan Badan Jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	620	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)		Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Permukim
	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah ( <i>earth work</i> )	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloan				
	630	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Hukum		
	630	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong <i>Strekdam</i> Kisdam <i>Coupure</i> Krib Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok R.O.W (sempadan Oprit Badan Perkerasan Drainase Baku Median Jembatan pada Jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah ( <i>earth work</i> ) Galian Tanah				
	630	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong <i>Strekdam</i> Kisdam <i>Coupure</i> Krib Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainase Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong <i>strekdam</i> , krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat Negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan,Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				
	640	Rumah Pedesaan Rumah contoh <i>Real estate</i> Elemen Bangunan Pondasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban Atap Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal		dan Penegak Hukum	dan fungsi lembaga pemerintah.	
	640	FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumusan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan Tanah, Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan, Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Aset, Daerah sampai dengan sertifikatnya, Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi, Tanah, Serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Kab/Kota, Fasilitasi administrasi Pertanahan, Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah, Evaluasi dan Pelaporan		Hukum		
	640	FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Penyediaan Rumah Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Kab/Kota Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>garapan lintas daerah Kab/Kota</p> <p>Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan</p> <p>Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kab/kota</p> <p>Penyelesaian masalah tanah lintas daerah</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan</p>				
	640	<p>PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis</p> <p>Menyiapkan bahan pengoordinasian</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat</p> <p>Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota</p> <p>Pemberian ijin lokasi</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
	640	<p>PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh	1. Dinas Pekerjaan Umum dan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis / Konstruksi Perumahan		Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utylitas Umum, Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpernghasilan Rendah. Pelaporan di bidang Perumahan Umum.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidng Perumahan Swadaya. Pengoordinasian di Bidang Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Swadaya. Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitasi dan Stimulan. Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.		Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Permukim
	640	PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Perencanaan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim
	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis Menyiapkan Bahan Pengoordinasian Pengkajian Prasarana Sarana Utilitas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Penyusunan dan Pengembangan Pengembangan Jejaring Kemitraan Evaluasi dan Pelaporan		Eksternal dan Penegak Hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	
	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis Pengoordinasian Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengkajian dan Penyusunan Inovasi Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Jejaring Kemitraan Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan teknis Penyiapkan Bahan Pengoordinasian Penyusunan Data Base Pengelolaan Data Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Perumahan Swadaya. Pemberdayaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.				
	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan ( site & servei ) Kepadatan Rendah ( low density ) Kepadatan Tinggi ( high density ) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah ( home industri ) Daerah Rekreasi ( open spece ) Publik Garden, Sport & playing fields Open space Transportasi ( tata letak ) Jaringan jalan Penerangan jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Jaringan kereta api				
	650	Jaringan Sungai <i>Assaineering</i> Saluran pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran, Pencemaran Air Pencemaran Udara, Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut Konservasi Sumber Daya Alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Lingkungan Hidup
	660	Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	Dinas Lingkungan Hidup
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya	Informasi arsip yang apabila	1. Sekretariat pada Dinas Perumahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal dan Penegak Hukum	diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.	dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>VII. PENGAWASAN</b>						
	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan, Penelitian/Riset, Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi Pengawasan Pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi Penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintah Daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan,	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Kabupaten/Kota Pengawasan Pemerintahan Desa		Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	
	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah
	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Hukum	kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, dan atau ketertiban umum	
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Kebudayaan, Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan, Migrasi/Urbanisasi, Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, dan atau ketertiban umum	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah
	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Rahasia	Dibatasi	Informasi arsip	Inspektorat,

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian, Pengawasan Pertanian dan Perkebunan, Pengawasan Kehutan-an, Pengawasan, Pertambangan/ESDM, Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian, Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan		hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perangkat Daerah, dan atau ketertiban umum	Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan, Pengawasan Jembatan, Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Inspektorat, Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah
	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak	Inpekstorat. Sekretariat Pada Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan pejabat/PNS Persengketaan PNS		Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	
	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawas Kebijakan dan Penegak Hukum	Informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kinerja Perangkat Daerah, fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum	Inspektorat. Sekretariat Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI